



Warga Transmigran Sidomulyo Berharap Bantuan Jokowi

Jalan dan Pengairan Seadanya, 7000 Hektare Jadi Lahan Tidur

Lebih dari 70 tahun, warga transmigran di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya memperjuangkan hidup mereka.

Hingga kini, mereka belum sepenuhnya sejahtera. Bagaimana kisahnya?

Deni Hamdani, Sidomulyo

PROGRAM transmigrasi di era presiden pertama RI, bernama Transmigran Sungai Durian ini, tetap saja belum mampu menggarap 10 ribu hektare lahan. Padahal lahan tersebut sudah sejak tahun 1955 diberikan kepada 600 lebih kepala keluarga di sana. Hanya sekitar tiga ribu hektare terga-

rap sebagai permukiman warga, lahan tani, dan kebun. Sisanya tujuh ribu hektare lebih masih berupa lahan tidur dan aneka tanaman liar. Penyebabnya infrastruktur jalan dan pengairan, masih seadanya.

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



DENI HAMDANI/PONTIANAK POST

BUTUH BANTUAN: Warga Transmigrasi Sidomulyo memohon kepada Presiden Jokowi, Menteri Transmigrasi, dan Menteri Pertanian, agar membantu pembangunan infrastruktur jalan dan pengairan warga di sana.



7000 Hektare Jadi Lahan Tidur....

Sambungan dari halaman 1

Muyoto (73), sesepuh sekaligus generasi pertama transmigrasi era presiden Soekarno masih ingat betul, ketika pertama kali menginjakkan kakinya ke Dusun Sidomulyo ini. Waktu itu tahun 1955, dia yang berumur 13 tahun datang dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Bersama ayah, ibu dan adiknya, keluarga ini menaruh harapan besar Transmigrasi Sungai Durian dapat mengubah keberuntungan keluarganya.

Datang dengan menumpang kapal laut dari Jatim, Muyoto bersama ayah, ibu, dan adiknya, merasa *shock*. Ternyata daerah transmigrasi yang bakalan ditempatinya, masih berupa hutan lebat dengan aneka tanaman liar. Se jauh matanya memandang Sidomulyo, hanya alam liar dengan aneka binatang terdengar nyaring dan lantang.

Suara aneka burung, jangkrik dan berbagai binatang liar saling bersahutan. Hampir setiap hari terdengar. Suasana sudah pasti sepi, sunyi, dan mengerikan. Belum lagi malam hari. Hanya gelap gulita yang kelihatan. Meski ada penerangan, namun masih seadanya. Api unggun buatan atau pelita berbahan bakar kerosene menjadi satu-satunya teman keluarga Muyoto berkumpul malam hari.

menerima jadup. Kami tak bisa menggarap lahan lantaran jalan penghubung belum terhubung. Pengairan tidak memadai. Untuk bertani juga tidak bisa," ujarnya.

Menjadi transmigran buat Muyoto memang penuh penderitaan waktu itu. Butuh puluhan tahun membuka keterisolasian pemukiman warga. Menghubungkan satu kawasan hingga ke dusun lain butuh waktu panjang. Dikerjakan juga dengan swadaya masyarakat. Pun demikian, membuka lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, penuh dengan perjuangan.

Melihat hijaunya tanaman padi, jagung berbuah lebat, tomat dan cabai berwarna warni tumbuh juga butuh usaha ekstra keras para transmigran. Transmigrasi waktu itu, seperti membuka sebuah kerajaan pada zaman dahulu kala.

Hingga generasi ketiga ini, Muyoto sendiri sudah dikarunia 6 anak dengan 10 cucu. Dia masih tidak mengerti, kenapa jalan-jalan pertanian dan pengairan belum terhubung dengan baik. Yang ada sekarang, swadaya masyarakat meskipun pemerintah juga pernah membantu. Dia hanya ingin sisa lahan sekitar 7 ribu hektare tidak sia-sia. Sebab lahan kosong tersebut, sejak tahun 1955 masih berupa aneka tanaman liar. "Dulu bisa digarap. Sejak muncul undang-undang karhutla, warga sudah takut," katanya.

hingga buah pepaya setiap harinya berasal dari sini," ucapnya

Pasokan sayur mayur asal Sidomulyo memang dikenal luas. Pedagang Pasar Flamboyan misalnya memesan dari sini dalam jumlah besar. Sementara aneka buah banyak dipasarkan di pinggir-pinggir toko buah di Kota Pontianak.

Mujito bersama generasi ketiga transmigran berharap lahan tidur seluas 7 ribu hektare dapat menjadi penyangga ketahanan pangan Kalbar dan Indonesia. Oleh karena itu, mereka membutuhkan uluran tangan pusat, agar visi dan misi transmigrasi era presiden pertama RI, benar-benar bisa sukses. "7 ribu hektare dengan saluran air dan jalan memadai, warga bakalan jaya. Tak perlu menunggu musim kemarau menjadi areal karhutla. Musim penghujan langanan banjir sampai memasuki pemukiman warga," kata anak transmigran generasi ke 3 dan 4 ini.

Musdi Temon, Ketua BPD Desa Limbung, menanggapi apa yang disampaikan masyarakat benar adanya. "Kami membantu floating lokasi dan luas wilayah. Sekarang by internet. Upaya dari desa sejak 2018 sudah bergerak ke pusat. Ada program pembangunan berkelanjutan. Sampai sekarang belum ada realisasi," katanya.

Mengandalkan kemandirian desa juga terbatas. Desa Limbung bagian Dusun Sidomulyo yang luas, terbatas anggarannya. Tak semua dana desa bisa dialokasikan.



Pondok tempat tinggalnya juga tidak semewah transmigrasi era sekarang. Ukurannya juga tidak lebih dari 6x7 meter. Dulunya, hanya berupa papan kayu buangan. Tiangnya dari kayu tebangan bulat besar. Sementara atapnya dari daun pelepah sagu besar ditumpukan secara banyak.

Musim hujan mendera, sering bocor. Musim pengering, cahaya matahari menyeruak masuk lewat celah-celah kecil. Intinya belum layak ditempati, tetapi transmigran memilih bertahan. Ada cita-cita yang dikejar keluarga ini dan ratusan keluarga transmigrasi lainnya.

"Almarhum bapak, ibu dan saya sudah bertekad bertahan. Bertahan karena ingin memiliki tanah sendiri di Sidomulyo. Di Jawa (Tulungagung), kami tidak ada tanah. Sudah sempit," kata Muyoto bercerita.

Meskipun mendiami pondok transmigrasinya, tetap saja Muyoto bersama transmigrasi lain belum bisa mengolah lahan. Waktu itu, jalan penghubung atau jalan poros belum ada. Yang ada hanya jalan setapak kecil. Dibuat peladang transmigran seadanya saja. Sementara areal lahan pertanian juga belum mendukung digarap. Penyebabnya pengairan tidak ada.

Untuk bertahan, Muyoto bersama transmigrasi lain tetap mengandalkan jadup (jatak hidup) pemerintah. Jadup yang terdiri dari beras, minyak, dan aneka makanan lain. Umumnya jadup diberikan selama 1 sampai 3 tahun untuk setiap kepala keluarga.

Namun pada eranya, dari tahun 1955 hingga 1965, mereka masih menerima jadup. Penyebabnya tadi infrastruktur jalan masih rusak. Sedangkan pengkairan transmigrasi juga tidak mendukung. "Selama 10 tahun, kami masih tetap

Era sekarang di daerahnya, pembangunan jalan dan irigasi parit dari patok awal butuh 6-7 kilometer. Memang sebelumnya pernah dibantu, tetapi tak cukup. Menuju lokasi penghubung sekunder C, kecamatan sebelah sekitar 1-3 kilometer belum disentuh pembangunan. Padahal warga transmigrasi Sidomulyo mengharapkan pembangunan terpadu. "Makanya hari ini (kemarin), kami berkumpul untuk bersuara dan memohon kepada Presiden RI, bapak Jokowi. Menteri Transmigrasi dengan Menteri Pertanian. Bantu kami, bapak ibu di sana," ucap dia lirih.

Mujito, Ketua Kelompok Tani Maju Makmur Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya juga tidak kalah lantang bersuara. Dia meminta lahan transmigrasi seluas 10 ribu hektare dimanfaatkan optimal. "Hanya 3 ribu hektare dimanfaatkan warga. Untuk tani, kebun dan pemukiman. Sisanya masih lahan terlantar. Mengarap 7 ribu hektare lahan juga tidak mudah. Membakar tak boleh era sekarang. Celakanya sejak tahun 1955, lahan-lahan ini masih berupa lahan liar dan ilalang," kata dia.

Mujito sama berharapnya kepada Presiden Jokowi, Menteri Transmigrasi dan Menteri Pertanian RI untuk membangun sarana dan prasana pertanian secara terpadu. Tujuannya agar lahan-lahan tidur masyarakat dapat digarap secara maksimal. "Jalan dan pengairan kami, sudah sejak lama rusak dan tidak memadai. Padahal dengan 3 ribu hektare saja, kami pemasok sayur mayur di sejumlah pasar tradisional Kota Pontianak dan Kubu Raya. Ratusan kilogram tomat, kacang panjang, timung, periak, cabe

Bicara 7 ribu hektare lahan tidur? desa pernah membicarakan pemanfaatan lahan tidur. Sejak 2016 munculnya uu karhutla, masyarakat menjadi makin takut menggarap lahan kosong dan tidur tersebut. Sebelum-sebelumnya pernah ditanam jagung dan sukses. Pembukaan dengan cara dibakar. Akan tetapi karhutla memaksa tidak bisa membuka lahan dibakar dan ditanam. Belum lagi jalan luas dan pengairan juga tak mendukung.

Untuk akses jalan? BPD menjawab ada dari dana desa. Hanya panjang jalan ditanggung desa tak sebanding dengan anggarannya. Di desa saja, jalan poros lebih dari 20 km butuh anggaran. Sementara di Sidomulyo tempat areal transmigrasi, masih banyak jalan poros dan lingkungan belum terbantu. Ada sekira 50 km lebih. Setiap tahun dianggarkan dana desa, APBD kabupaten juga ada. "Namun panjang dan luasnya memang mengharuskan pemerintah pusat yang turun langsung," kata dia.

Suprpto, tokoh masyarakat lainnya berharap kepada Presiden Jokowi membantu masyarakat transmigrasi era presiden pertama RI ini. "Kondisi sering banjir, musim hujan mendera dan musim asam sudah jadi bagian hidup warga transmigran di sini. Petani di sini sangat kewalahan menghadapinya," ujarnya. "Apalagi radius kawasan kami dekat Bandara Internasional Supadio. Tolong kami pak presiden, pemukiman kami sangat terlantar. Wujudkan mimpi kami menjadi transmigran dan petani sukses," timpalnya. (den)